



Tambah Kapasitas Rumah Sakit

Untuk Pasien Korona di DIJ

JOGJA, Radar Jogja - Dua pekan terakhir pandemi Covid-19 di DIJ sangat mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari tambahan kasus positif virus korona bahkan menyentuh angka 300 kasus. Muncul kekhawatiran fasilitas kesehatan akan penuh dan tidak bisa lagi menampung pasien yang terpapar virus ini.

► Baca Tambahan... Hal 3

Sambungan dari hal 1

Gubernur Hamengku Buwono X pun menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pasien Covid-19 yang kesulitan mencari ruang perawatan di rumah sakit (RS). Menurutnya, laporan dari masyarakat itu perlu didalami dan ditindaklanjuti. Apakah pasien yang kesulitan itu sudah mencari ruang perawatan di RS rujukan Covid-19, atau baru mencari ruang perawatan di RS non rujukan.

"Yang mengatakan tidak ada tempat itu sudah mencari ke RS rujukan yang tercantum dalam SK Gubernur atau kepala daerah tidak? Karena yang tidak masuk dalam keputusan itu bukan untuk menangani Covid-19," jelas HB X kepada awak media di Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (18/1). Kendati demikian, gubernur tidak menampik bahwa tingkat keterisian tempat tidur (TT) milik 27 RS rujukan di DIJ berada dalam kondisi padat. Yakni mencapai di atas 80 persen

dari kapasitas yang tersedia. Se jauh ini, upaya penambahan kapasitas RS belum bisa berjalan optimal. Terlebih seluruh RS swasta baru diwajibkan untuk menyediakan 10 persen dari total kapasitas TT untuk merawat pasien terpapar virus korona. "Jadi kalau rumah sakit swasta punya kamar 20, 10 persen kira-kira hanya ada dua yang untuk merawat pasien Covid-19," lanjutnya. Ketika ditanya apakah pihaknya akan mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur pening-

katan kapasitas RS swasta untuk pasien korona, HB X mengaku belum akan mengeluarkan aturan seperti itu. Menurutnya, kebijakan seperti itu akan berdampak juga pada kondisi finansial rumah sakit swasta. Pasalnya, rumah sakit swasta harus mengurus klaim pembiayaan terlebih dahulu ke BPJS. Kondisi itu tentu akan mengganggu finansial mereka.

HB X juga menjelaskan, saat ini untuk rumah sakit pemerintah sudah diwajibkan menyediakan

40 persen kapasitas untuk pasien korona. Tidak menutup kemungkinan nantinya kewajiban itu akan naik menjadi 60 persen jika memang diperlukan. "Kalau yang milik pemerintah tidak masalah," tandasnya.

Sementara itu Direktur RSUP Dr Sardjito Rukmono Siswihanto mengatakan, pihaknya sudah berupaya menambah kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19. Tapi ia menegaskan tempat tidur itu untuk mereka yang memiliki gejala berat saja. Atau mereka yang terkena korona tapi sedang mengalami keadaan darurat, misalnya harus melakukan persalinan atau operasi.

Kendati demikian, Rukmono juga menyatakan penambahan kamar maupun tempat tidur itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Terutama soal penambahan tenaga kesehatan. "Kemarin itu ada rekrutmen, tapi kebanyakan mundur karena tidak ada izin dari keluarga," katanya.

Minta Info Ketersediaan Bed secara Real Time

Pemkot Jogja akan menambah kapasitas tempat tidur untuk

perawatan Covid-19. Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, data terakhir kesiapsanggupan tambahan tempat tidur sebanyak 23 unit.

Jumlah ini merupakan hasil yang sudah disepakati dengan provinsi. "Kalau info, sampai sekarang ya ada tambahan. Hingga kemarin siang ketika saya rapat dengan Pak Gubernur itu, yang kita sepakati jadi tambah 23 bed," katanya di Ruang Sadewa, kemarin (18/1).

HP menjelaskan dengan tambahan itu maka total tempat tidur yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Jogja menjadi 229 bed. Jumlah ini sudah melebihi dari target yang sebelumnya disanggupi tujuh rumah sakit (RS) rujukan.

"Artinya rumah sakit terus meningkat karena dulu janjinya minimal 98 bed. Itu jadi meningkat," ujarnya.

Selain itu, dari sebelumnya di tujuh RS rujukan terdapat 23 bed critical ICU. Bulan Januari ini akan ada penambahan dua bed lagi menjadi 25 bed. Jumlah yang ditambah ini berada di RS Jogja.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan rumah sakit rujukan lain juga akan ada upaya penambahan, terutama di RS Pratama karena hanya ada satu bed perawatan di ruang critical ICU. "Saya baru saja diskusi dengan Pak Sekda, minta ditambah di RS Pratama untuk penyediaan ICU yang kritis," jelasnya.

HP menyebut, kamar perawatan critical ICU memang pada titik tertentu ada kalanya mengalami antrean karena keterbatasan sarana. Rata-rata tujuh RS rujukan hanya memiliki 1-3 bed untuk ruang perawatan critical ICU, sehingga upaya ini sebagai bentuk merespons keterbatasan yang ada.

"Terutama pada akhir Desember kadang-kadang ada pada titik tertentu yang penuh. Tapi tidak sampai lama, sebenarnya karena fluktuatif itu. Tapi mereka tidak pernah menyalurkan ke RS lain, karena tidak tahu yang kosong mana. Nah, dalam satu dua hari ini kami minta ada info yang *real time* dari rumah sakit agar tidak simpang siur mana yang masih ada tersedia bednya," tandas HP. (kur/wia/laz/fj/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005